



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Tahun 2021

Dinas Komunikasi Dan Informatika


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun Anggaran 2021.

LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2021, berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah disepakati dan disusun dalam DPA 2021 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2021 dengan analisis perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akandatang untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pelaksanaan *e-Government* di Kota Bogor.

Bogor, Desember 2021

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala, <u>Rahmat Hidayat, S.Sos, MM</u> Pembina Utama Muda
---	---

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM	2
B. GAMBARAN UMUM DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR	5
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
A. KETERKAITAN FUNGSI DENGAN MISI RPJMD	12
B. TUJUAN DAN SASARAN	12
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	13
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN	15
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	23
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	45
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN	45
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH	46
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	47
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	49
BAB VI PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang menangani urusan wajib dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi.

Dalam rangka menuju dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk aktif memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disegala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas dibidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke wilayah pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan peran TIK dapat menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah kepadapublik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Pemerintah Pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Pelayanan pemerintah

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-government*) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi dan tranparansi. Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor terus mengembangkan TIK serta Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun belum maksimal karena berbagai persoalan masih mewarnai proses penyelenggaraannya antara lain dalam aspek kebijakan, perencanaan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur dan anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah berupaya menangani permasalahan ini antara lain dengan menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur secara bertahap, pengembangan aplikasi, penyebarluasan informasi publik, mengikuti bimbingan teknis Sumber Daya Manusia dan kajian kelembagaan serta melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa pemangku kepentingan.

A. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government;
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 51 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTABOGOR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor yaitu Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi. Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Misi Kedua Pemerintah Kota Bogoryaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi telah menjadi tren baru bahkan merambah kepada tata kelola pemerintahan, bahkan dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Dengan data pemerintahan yang dikelola secara elektronik diharapkan teknik pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan memberikan

dukungan terhadap pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Pemerintah daerah berperan secara optimal dengan berusaha melakukan akselerasi dengan memanfaatkan teknologi dalam menyikapi kondisi kekinian dengan menerapkan konsep *smart city*. Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor sebagai leading sektor dalam implementasi *smart city* berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan TIK bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kota Bogor sebagai *smart city* sebagai upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

1. **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor termasuk kedalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:

a. **Kepala Dinas;**

b. **Sekretariat, membawahkan:**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. **Bidang Statistik Sektoral membawahkan:**

1. Seksi Metadata Statistik Sektoral;
2. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Statistik Sektoral;
3. Seksi Infrastruktur Statistik Sektoral;

- d. **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan;**
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik;
 - 3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi;
- e. **Bidang Jaringan, Domain dan Persandian membawahkan:**
 - 1. Seksi Tata Kelola Domain;
 - 2. Seksi Infrastruktur Jaringan;
 - 3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. **Bidang e-Government, membawahkan:**
 - 1. Seksi Tata Kelola e-Government;
 - 2. Seksi Pusat Data;
 - 3. Seksi Layanan Aplikasi
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor



Sumber : Diskominfo Tahun 2021

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan teknis operasional dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin:

Jabatan Pegawai	Jenis Kelamin	
	Perempuan	Laki-laki
Kepala Dinas		1
Sekretaris		1
Kepala Bidang		4
Kepala Seksi/Sub Bagian	6	9
Jabatan Fungsional Tertentu	1	4
Pelaksana	12	11
JUMLAH TOTAL	19	30
	49	

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan:

No	Jabatan Pegawai	Eselon	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jumlah
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas	IIa															1		1
2	Sekretaris	IIIa														1			1
3	Kepala Bidang	IIIb											1	3					4
4	Kepala Sub Bagian	IVa											2	1					3
5	Kepala Seksi	IVa											2	8	2				12
6	Jabatan Fungsional Tertentu	-									1	2	2						5
7	Pelaksana	-							5	3	9	3	1	2					23
Jumlah									5	3	10	5	5	13	6	1	1		49

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan

c. Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan:

Jabatan Pegawai	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	S3	
KepalaDinas								1		1
Sekretaris								1		1
Kepala Bidang						1	2	1		4
Kepala Seksi/ Sub Bagian							8	7		15
Jabatan Fungsional Tertentu					2		3			5
Pelaksana			4		6		11	2		23
TOTAL										49

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

4. Daftar Asset yang Dikelola

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Kendaraan Roda 4	6	unit
2.	Kendaraan Roda 2 Matic 150 cc	7	unit
3.	PC	79	unit
4.	Laptop core i3	5	unit
5.	Printer inkjet	32	unit
6.	AC	34	unit
7.	Mesin Tik Elektrik	2	unit
8.	Mesin Penghancur	3	unit
9.	Dispenser	5	unit
10.	Kulkas 2 Pintu	3	unit
11.	Vacuum Cleaner 1000 watt	2	unit
12.	Lemari Besi	9	unit
13.	Filling Cabinet	19	unit
14.	Kursi Kerja Putar	34	unit
15.	Meja Kerja	61	unit
16.	Kursi Tamu	5	unit
17.	Laptop core i7	15	unit
18.	Laptop core i5	1	unit
19.	Laptop (berbagai merk)	13	unit
20.	Hardisk External	4	unit
21.	Monitor 21.5	1	unit
22.	Proyektor	4	unit
23.	Layar Proyektor	3	unit
24.	Lemari Rak Arsip Kayu	17	unit
25.	Anjungan Informasi Publik	18	unit
26.	Server	14	Paket
27.	Genset	1	unit
28.	CCTV Taman Kota	7	unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
29.	CCTV Monitoring	34	unit
30.	Handy Talky	23	unit
31.	Drone	3	unit
32.	Action Camera	1	unit
33.	Camera	5	unit
34.	Tripod	6	unit
35.	Printer Epson	14	unit
36.	Lemari Locker	1	unit
37.	Microphone Headseat	17	unit
38.	Anti Virus Sophos	1	Paket
39.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur Bogor Barat dan Jalur Kelurahan Loji	1	Paket
40.	Jaringan FO Intranet Kota Bogor Jalur Tanah Sareal Rute Sukaresmi-Sukadamai	1	Paket
41.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure Cipaku – Pamoyanan	1	Paket
42.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Rute Cibuluh - Tanah Baru	1	Paket
43.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure PUPR dan BPKSDA (Gedung Baru)	1	Paket`
44.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Rumdin - MPP	1	Paket`
45.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Payonan - Rangga Mekar	1	Paket`
46.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Damkar - Sukasari	1	Paket`
47.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Genteng - Kertamaya	1	Paket`
48.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Semplak - Curug	1	Paket`
49.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO MPP - Kel. Babakan	1	Paket`
50.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Kel. Sukadamai - Puskesmas Mekarwangi	1	Paket`
51.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Puskesmas Mekarwangi - PUPR	1	Paket`
52.	Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor FO Damkar - Kel. Katulampa	1	Paket`

Tabel 1.4
Prasarana dan Sarana Dinas
Komunikasi dan Informatika

BAB II

KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH

A. KETERKAITAN FUNGSI DENGAN MISI RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung terlaksananya misi kedua pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”. Untuk mewujudkan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas smart government

Sasaran 1 : a. Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep

Good Governance

b. Tersedianya data statistik sektoral

Tujuan 2 : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut :

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasidan komunikasi dalam rangka penerapan konsep <i>Good Governance</i>	Meningkatkan tata kelola kelembagaan.	Meningkatkan peran Dinas Kominfostandi sebagai Government Chief Information Officer (GCIO) Kota Bogor.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK.
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK.	Peningkatan prasarana dan sarana data center sesuai standar.
		Penyediaan jaringan fiber optik di perangkat daerah.
		Penetapan regulasi pengelolaan server.
		Memenuhi Kebutuhan Server Back Up Data dan DRC.
		Penyediaan dan Pemeliharaan CCTV.
		Melaksanakan penataan dan pemeliharaan CCTV se-Kota Bogor.
	Meningkatkan Layanan Interoperabilitas.	Melaksanakan Layanan Telekonferensi Pemerintah.
Menyelenggarakan Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi bagi Seluruh Perangkat Daerah dengan menetapkan standar format data dan aplikasi.		

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Menyelenggarakan Layanan <i>Application Programm Interface</i> (API) daerah.
		Melaksanakan layanan <i>Repository/ Datawarehouse</i> .
		Penetapan Regulasi tentang Hak Akses, Pengelolaan DataBase dan <i>Datawarehouse</i> .
		Meningkatkan jumlah sistem informasi yang diintegrasikan.
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat berbasis elektronik dan media cetak.
	Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi	Merumuskan regulasi yang mengatur tentang keamanan informasi.
	Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik	Integrasi layanan pengaduan non kedaruratan (<i>call center</i>) dengan layanan kedaruratan (NTPD) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari.
Tersedianya data statistik sektoral	Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data	Menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral.
Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaDinas	Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Tabel 2.1.
Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pada tahun 2021 melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan target output, realisasi dan capaian kinerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan laporan perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan laporan perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen	100%
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 100%.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 100%	100%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket	100%
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 4 paket	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 4 paket	100%
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 100%	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 100%	100%
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 5 paket	tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 2 paket. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan terkena refocussing anggaran	40%
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi 100%	Tersedianya jasa komunikasi 100%	100%
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 4 orang 2. Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat sebanyak 13 orang 3. Tersedianya outsourcing Operator bogor green room sebanyak 1 paket 4. Tersedianya Outsourcing CCTV sebanyak 1 paket 5. Tersedianya Outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 paket 6. Tersedianya Outsourcing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 4 orang 2. Tersedianya Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat sebanyak 13 orang 3. Tersedianya outsourcing Operator bogor green room sebanyak 1 paket 4. Tersedianya Outsourcing CCTV sebanyak 1 paket 5. Tersedianya Outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 paket 6. Tersedianya Outsourcing 	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
		Jaringan Infrastruktur sebanyak 1 paket 7. Tersedianya Outsourcing Pengelola Media Komunikasi Publik sebanyak 8 orang 8. Tersedianya Outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 paket 9. Tersedianya Outsourcing Pusat Data sebanyak 1 paket 10. Tersedianya Pengelola Portal Data sebanyak 2 orang 11. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi sebanyak 1 orang 12. Terbayarnya Hutang 2020 sebanyak 1 paket	Jaringan Infrastruktur sebanyak 1 paket 7. Tersedianya Outsourcing Pengelola Media Komunikasi Publik sebanyak 8 orang 8. Tersedianya Outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 paket 9. Tersedianya Outsourcing Pusat Data sebanyak 1 paket 10. Tersedianya Pengelola Portal Data sebanyak 2 orang 11. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi sebanyak 1 orang 12. Terbayarnya Hutang 2020 sebanyak 1 paket	
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 13 kendaraan 2. Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor sebanyak 1 paket	1. Tersedianya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 13 kendaraan 2. Tersedianya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor sebanyak 1 paket	100%
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Tersedianya pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebanyak 1 paket 2. Tersedianya Pemeliharaan Komputer-Komputer sebanyak 1 paket	1. Tersedianya pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebanyak 1 paket 2. Tersedianya Pemeliharaan Komputer-Komputer sebanyak 1 paket	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebanyak 1 paket 2. Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebanyak 1 paket 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebanyak 1 paket 2. Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior tidak terealisasi karena terkena refocusing anggaran 	50%
II.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konten Audio Visual di Multimedia dan Media Sosial sebanyak 24 tayangan 2. Perangkat Penunjang Komunikasi Publik sebanyak 1 paket 3. Tersedianya Booklet Smart City sebanyak 300 buku 4. kegiatan Bakohumas sebanyak 1 kegiatan 5. forum Perhumas sebanyak 1 kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konten Audio Visual di Multimedia dan Media Sosial sebanyak 24 tayangan 2. Perangkat Penunjang Komunikasi Publik sebanyak 1 paket 3. Tersedianya Booklet Smart City sebanyak 300 buku 4. kegiatan Bakohumas sebanyak 1 kegiatan 5. forum Perhumas sebanyak 1 kegiatan 	100%
2.	Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebanyak 1 dokumen 2. Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra sebanyak 1 paket 3. Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat sebanyak 1 paket 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebanyak 1 dokumen 2. Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra sebanyak 1 paket 3. Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat sebanyak 1 paket 	100%
3.	Layanan Hubungan Media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Tahun selama 1 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Tahun selama 1 tahun 	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
		2. Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan selama 1 tahun 3. Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk sepanjang 466 meter 4. Tenaga konsultan analisis media masa sebanyak 6 orang 5. Tersedianya Konten Publikasi sebanyak 1 konten	2. Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan selama 1 tahun 3. Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk sepanjang 466 meter 4. Tenaga konsultan analisis media masa sebanyak 6 orang 5. Tersedianya Konten Publikasi sebanyak 1 konten	
III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
A.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten	Tersedianya Colocation Server Domain dan Sub Domain Kota Bogor selama 1 tahun	Tersedianya Colocation Server Domain dan Sub Domain Kota Bogor selama 1 tahun	100%
2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Tersedianya perangkat LAN sebanyak 2 paket 2. Tersedianya Perangkat FO sebanyak 2 paket 3. Tersedianya Perangkat Wireless sebanyak 2 paket 4. Terpeliharanya Jaringan Intranet dan Internet (Backbone) dan Tertatanya Jaringan Intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor sebanyak 146 titik 5. Tersedianya Bandwidht Internet se Kota Bogor sebanyak 900 Mbps 6. Tersedianya Jaringan Fiber Optik di perangkat daerah sebanyak 4 titik	1. Tersedianya perangkat LAN sebanyak 2 paket 2. Tersedianya Perangkat FO sebanyak 2 paket 3. Tersedianya Perangkat Wireless sebanyak 2 paket 4. Terpeliharanya Jaringan Intranet dan Internet (Backbone) dan Tertatanya Jaringan Intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor sebanyak 146 titik 5. Tersedianya Bandwidht Internet se Kota Bogor sebanyak 1250 Mbps 6. Tersedianya Jaringan Fiber Optik di perangkat daerah sebanyak 4 titik	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
		7. Terlaksananya perencanaan teknis jaringan FO sebanyak 1 paket 8. Terlaksananya pengawasan teknis jaringan FO sebanyak 1 paket 9. Terpeliharanya Wifi Ruang Publik sebanyak 5 titik 10. Tersedianya Wifi Ruang Publik sebanyak 1 titik 11. Terpeliharanya Grounding Listrik dan Erester Perangkat Daerah dan Kelurahan sebanyak 7 titik	7. Terlaksananya perencanaan teknis jaringan FO sebanyak 1 paket 8. Terlaksananya pengawasan teknis jaringan FO sebanyak 1 paket 9. Terpeliharanya Wifi Ruang Publik sebanyak 5 titik 10. Tersedianya Wifi Ruang Publik sebanyak 1 titik 11. Terpeliharanya Grounding Listrik dan Erester Perangkat Daerah dan Kelurahan sebanyak 7 titik	
B.	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
1.	Sinkronisasi Rencana Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun sebanyak 3 kali	Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun sebanyak 3 kali	100%
2.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. Terkelolanya Perangkat Pusat Data sebanyak 1 paket 2. Tersedianya Router sebanyak 1 paket 3. Tersedianya Data Recovery Center sebanyak 1 paket	1. Terkelolanya Perangkat Pusat Data sebanyak 1 paket 2. Tersedianya Router sebanyak 1 paket 3. Tersedianya Data Recovery Center sebanyak 1 paket	100%
3.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terkelolanya Perangkat Teleconference Kota Bogor sebanyak 1 paket	Terkelolanya Perangkat Teleconference Kota Bogor sebanyak 1 paket	100%
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terpeliharanya Jumlah Titik CCTV di Lingkup Kota Bogor sebanyak 69 titik	Terpeliharanya Jumlah Titik CCTV di Lingkup Kota Bogor sebanyak 69 titik	100%
5.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo sebanyak 3 aplikasi 2. Tersedianya Aplikasi Dashboard khusus covid sebanyak 1 aplikasi 3. Tersedianya Colocation Server Webmail Kota Bogor selama 1 tahun	1. Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo sebanyak 3 aplikasi 2. Tersedianya Aplikasi Dashboard khusus covid sebanyak 1 aplikasi 3. Tersedianya Colocation Server Webmail Kota Bogor selama 1 tahun	90%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
		4. Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel selama 1 tahun 5. Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor selama 1 tahun 6. Tersedianya Memory Server sebanyak 5 unit 7. Tersedianya Harddisk Server sebanyak 2 unit 8. Tersedianya Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kota Bogor sebanyak 1 paket 9. Tersedianya Perangkat Pendukung Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 unit 10. Tersedianya Workshop Integrasi sebanyak 1 pertemuan	4. Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel selama 1 tahun 5. Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor selama 1 tahun 6. Tersedianya Memory Server sebanyak 5 unit 7. Tersedianya Harddisk Server sebanyak 2 unit 8. Tersedianya Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kota Bogor tidak terealisasi 9. Tersedianya Perangkat Pendukung Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 unit 10. Tersedianya Workshop Integrasi sebanyak 1 pertemuan	
6.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terpeliharanya Server Datawarehouse sebanyak 1 paket	Terpeliharanya Server Datawarehouse sebanyak 1 paket	100%
7.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tersedianya Sarana Komunikasi Digital sebanyak 1 paket	Tersedianya Sarana Komunikasi Digital sebanyak 1 paket	100%
8.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Terpeliharanya perangkat multimedia Bogor Green Room/ command center sebanyak 1 paket 2. Tersedianya peralatan personal computer sebanyak 1 paket	1. Terpeliharanya perangkat multimedia bogor green room/ command center sebanyak 1 paket 2. Tersedianya peralatan personal computer sebanyak 1 paket	100%
9.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tercapainya hasil penilaian SPBE 2,92 indeks	Tercapainya hasil penilaian SPBE 3,11 indeks	106,5%
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi	Terselenggaranya satu data statistik sektoral	Terselenggaranya satu data statistik sektoral	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUT		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	sebanyak 2 paket	sebanyak 2 paket	
2.	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan sebanyak 1 Media	Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan sebanyak 1 Media	100%
3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1. Tersusunnya metadata statistik sectoral sebanyak 1 paket 2. Tersusunnya Buku Induk Statistik sebanyak 1 paket	1. Tersusunnya metadata statistik sectoral sebanyak 1 paket 2. Tersusunnya Buku Induk Statistik sebanyak 1 paket	100%
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1. Tersedianya Antivirus sebanyak 12 lisensi 2. Tersedianya Software (Microsoft Office) sebanyak 5 lisensi 3. Tersedianya Sistem Operasi (Windows) sebanyak 10 lisensi 4. Tersedianya SSL sebanyak 1 lisensi 5. Tersedianya Firewall sebanyak 1 lisensi	1. Tersedianya Antivirus sebanyak 12 lisensi 2. Tersedianya Software (Microsoft Office) sebanyak 5 lisensi 3. Tersedianya Sistem Operasi (Windows) sebanyak 10 lisensi 4. Tersedianya SSL sebanyak 1 lisensi 5. Tersedianya Firewall sebanyak 1 lisensi	100%
2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran di refocusing	1. Penerbitan Sertifikat Elektronik 2. Penetration Testing Aplikasi	-

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor maka disusunlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja, meliputi 4 dokumen, yaitu :

- a) Renja,
- b) LKIP,
- c) LPPD dan
- d) LKPJ.

Realisasi output pelaksanaan sub kegiatan dimaksud mencapai 100% sesuai dengan targetnya, dan realisasinya berupa 4 dokumen yang dicetak menjadi 100 buah buku yaitu, buku Renja, buku LKIP, buku LPPD, dan buku LKPJ

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Pembayaran gaji dan tunjangan ASN terealisasi 100% dengan terbayarkannya gaji dan tunjangan seluruh ASN Dinas selama 1 tahun.

Digunakan untuk Belanja Pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan berupa gaji PNS, iuran kepada BPJS, dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Belanja pegawai diluar belanja gaji, berupa tambahan penghasilan bagi

PNS yang didasarkan pada beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi output pelaksanaan sub kegiatan ini mencapai 100% sesuai dengan targetnya yaitu Tersedianya Komponen belanja Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan sasaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi output pelaksanaan sub kegiatan ini mencapai 100% sesuai dengan targetnya yaitu terealisasi sebanyak 4 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi output pelaksanaan sub kegiatan ini mencapai 100% sesuai dengan targetnya yaitu Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket yaitu Belanja Cetak.

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi output belum mencapai target dikarenakan kondisi pandemic yang tidak memungkinkan untuk terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan ini, saat awal perencanaan, output

ditargetkan 5 paket sarana dan prasarana Gedung, namun karena adanya refocusing anggaran, maka mengalami perubahan target output menjadi 2 paket. 2 paket tersebut terealisasi 100% yaitu :

- a) Belanja Modal Alat Penyimpan
Perlengkapan Kantor
- b) Belanja Modal Peralatan Studio Audio

Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah :

- a) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/perabot kantor (karpet)
- b) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) (dispenser)
- c) Foto Copy

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor yakni kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Realisasi output mencapai 100% sesuai dengan targetnya yaitu Tersedianya jasa komunikasi

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sehubungan dengan jumlah ASN yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, maka Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menyediakan jasa pelayanan umum kantor berupa tenaga pendukung Non ASN.

Realisasi output pelaksanaan sub kegiatan dimaksud mencapai 100% sesuai dengan targetnya yaitu

tersedianya tenaga Non ASN yaitu sebanyak 58 Orang yang terdiri dari :

- a) Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 4 orang
- b) Operator Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat sebanyak 13 orang
- c) outsourcing Operator bogor green room sebanyak 1 paket
- d) Outsourcing CCTV sebanyak 1 paket
- e) Outsourcing Desainer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 paket
- f) Outsourcing Jaringan Infrastruktur sebanyak 1 paket
- g) Outsourcing Pengelola Media Komunikasi Publik sebanyak 8 orang
- h) Outsourcing Programmer Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 paket
- i) Outsourcing Pusat Data sebanyak 1 paket
- j) Pengelola Portal Data sebanyak 2 orang
- k) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi sebanyak 1 orang

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi output pelaksanaan sub kegiatan dimaksud mencapai 100% baik dalam pemeliharannya dan pembayaran pajaknya sesuai dengan targetnya yaitu sebanyak 13 kendaraan yaitu :

- a) 1 buah kendaraan roda empat type Double Cabin
- b) 3 buah kendaraan roda empat type Toyota Avanza
- c) 1 buah kendaraan roda empat type KIA Sportage

- d) 1 buah kendaraan roda empat type Kijang Innova
- e) 4 buah kendaraan roda dua type Honda
- f) 1 buah kendaraan roda dua type Yamaha NMYX
- g) 2 buah kendaraan roda dua type Yamaha

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output sub kegiatan ini terealisasi 100 % sesuai targetnya yaitu :

- a) Tersedianya pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebanyak 1 paket
- b) Tersedianya Pemeliharaan Komputer-Komputer sebanyak 1 paket

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan ini, dari target output semula yaitu

- a) Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebanyak 1 paket terealisasi 100%, sedangkan
- b) Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebanyak 1 paket, karena mengalami refocusing anggaran, maka tidak terlaksana.

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

ini, terdapat 5 target output dengan realisasi 100% sebagai berikut :

a) Konten Audio Visual Multimedia sebanyak 24 tayangan berisi mengenai kegiatan-kegiatan, rencana, dan capaian pembangunan di Kota Bogor. Berikut konten-konten audio visual multimedia :

- (1.) Sidak Tempat Hiburan Malam Saat PPKM
- (2.) Pantauan Kinerja ASN Saat Pemberlakuan WFH 100%
- (3.) Pelaksanaan Vaksinasi Massal di Kota Bogor
- (4.) Waspada Banjir dan Longsor
- (5.) Vaksinasi Bagi ASN, TNI, Polri dan Petugas Layanan Publik
- (6.) Layanan Cetak E-KTP
- (7.) Kegiatan APEKSI di Kota Bogor
- (8.) Pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Bogor
- (9.) Panen besar ikan nila di Kel Menteng Kec Bobar
- (10.) Peninjauan vaksin lansia di RS Vania
- (11.) Kunjungan ke sukarelawan pengatur lalin
- (12.) Himbuan tidak mudik saat Idul Fitri 1442 H
- (13.) ASN peduli
- (14.) Gki yasmin
- (15.) Bogorian voice
- (16.) Terowongan kuda di Jln Nyi Raja Permas
- (17.) Peresmian Alun-alun
- (18.) Peresmian Kampung perca
- (19.) Sehat dipusat Kota peradaban
- (20.) Apeksi Outlook 2021 di Bali
- (21.) Kongres jaringan kota pusaka Indonesia
- (22.) Layanan drive thru Disdukcapil
- (23.) Peran anak muda membangun daerah
- (24.) Peresmian koridor bus kita

- b) Perangkat Penunjang Komunikasi Publik sebanyak 1 paket, dalam pelaksanaan tugas komunikasi publik diperlukan beberapa perangkat penunjang. Untuk itu pada tahun 2021 Diskominfo melaksanakan pengadaan barang seperti kamera, smartphone / iPad, Laptop, media penyimpanan data external.
- c) Booklet smart city sebagai media external untuk penyampaian inovasi-inovasi smartcity yang sudah dilaksanakan di kota bogor. Dicitak sebanyak 300 buah booklet.
- d) Kegiatan Bokohumas dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 dengan tema “Sinergi Pengelolaan Media Sosial Pemerintahan” . kegiatan tersebut dilaksanakan di Paseban Sri Baduga. Dengan Narasumber tenaga ahli pengelolaan media sosial dan peserta berasal dari seluruh admin media sosial perangkat daerah serta kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- e) Perhumas dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 secara on line. Tema Perhumas 2021 adalah mengintip peran influencer di Program Kehumasan. Dengan narasumber berasal dari Pengurus Perhumas Pusat dan Peserta berasal dari praktisi humas se Kota Bogor

2) Pelayanan Informasi Publik

Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik memiliki 3 target output dengan realisasi sebagai berikut :

- a) Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebanyak 1 dokumen, sudah dilaksanakan, yaitu pada tahun 2021 dilaksanakan pembuatan Laporan KIP tahun 2020 yang dilaporkan

setiap tahunnya di bulan Maret 2021. Untuk Laporan KIP tahun 2021, saat ini sedang dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. adapun kegiatan pelaporannya akan dilaksanakan bulan Februari 2022 untuk selanjutnya dilaporkan ke Komisi Informasi Jawa Barat.

- b) Tersedianya Pemeliharaan Aplikasi Sibadra sebanyak 1 paket, sudah dilaksanakan, yaitu melakukan pemeliharaan aplikasi sibadra dan pengembangan dengan menambah fitur survey kepuasan masyarakat (SkM) juga fitur membuat laporan/aduan melalui Whatsapp. Fitur survey bertujuan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat kota bogor di dalam menggunakan aplikasi sibadra, indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan pada triwulan 4 dengan proses ujicoba pada aplikasi d bulan oktober serta dilaksanakan pada bulan november dan desember 2021 dengan nilai 70.51 point. Fitur aduan melalu Whatsapp bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuat laporan/aduan sehingga lebih cepat dan lebih mudah.
- c) Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat sebanyak 1 paket, sudah terealisasi dengan dilakukan integrasi layanan pengaduan melalui aplikasi sibadra dan layanan pengaduan melalui call center 112. Layanan pengaduan call center 112 bertujuan untuk Memfasilitasi Teknologi Informasi Normal Panggilan Darurat 112 dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.

3) Layanan Hubungan Media

Layanan Hubungan Media merupakan penyebaran informasi kebijakan pemerintah melalui media cetak elektronik dan online sehingga informasi dapat dipublikasikan secara cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sub kegiatan ini memiliki 5 target output dengan realisasi mencapai 100% yaitu sebagai berikut :

- a) Advertorial dan Analisis Media Cetak, Elektronik dan Online Tahun selama 1 tahun, Terlaksananya advertorial media online lokal 952 tayang yaitu :
 - (1.) Media cetak nasional 7 tayang
 - (2.) Media online nasional 582 tayang
 - (3.) Media cetak lokal 240 tayang
 - (4.) Redaktur menulis 176 tayang/per artikel
 - (5.) ILM Radio lokal 36 kali
 - (6.) ILM TV Lokal 12 kali
 - (7.) ILM TV Nasional 4 kali
- b) Terselenggaranya Jumpa Pers Wartawan selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 60 kali.
- c) Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk sepanjang 466 meter, terealisasinya penyebaran informasi kebijakan Pemerintah melalui media spanduk sebanyak 46 spanduk
- d) Tenaga konsultan analisis media masa sebanyak 6 orang, terealisasi 6 orang tenaga analisis.
- e) Tersedianya Konten Publikasi sebanyak 1 konten, terealisasi 1 konten.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten

Sub kegiatan ini memiliki target output Tersedianya Colocation Server Domain dan Sub Domain Kota Bogor selama 1 tahun dengan realisasi sebagai berikut :

Sewa Layanan Colocation Server CPanel Kota Bogor dan Subdomain Kota Bogor dimaksud untuk memberikan layanan colocation server CPanel Diskominfo yang berisi website dan aplikasi pemerintah Kota Bogor agar dapat berfungsi dengan baik secara berkelanjutan. Dengan tujuan agar tersedia layanan colocation server CPanel Diskominfo beserta perangkat pendukungnya dan tersedianya keikutsertaan Nama Domain Indonesia kotabogor.go.id pada Registrasi Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini memiliki 11 target output dengan realisasi sebagai berikut :

- a) Tersedianya perangkat LAN sebanyak 2 paket terealisasi 100%, sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet Kota Bogor yang dapat menunjang kegiatan informasi dalam sarana pengetahuan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan khususnya aparatur dilingkungan Kota Bogor.

- b) Tersedianya Perangkat FO sebanyak 2 paket, terealisasi 100%, sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet Kota Bogor yang dapat menunjang kegiatan informasi dalam sarana pengetahuan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan khususnya aparatur dilingkungan Kota Bogor.
- c) Tersedianya Perangkat Wireless sebanyak 2 paket, terealisasi 100%, sesuai dengan kebutuhan dalam Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet Kota Bogor.
- d) Terpeliharanya Jaringan Intranet dan Internet (Backbone) dan Tertatanya Jaringan Intranet LAN pada Perangkat Daerah se Kota Bogor sebanyak 146 titik terealisasi 100%, bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas layanan intranet dan internet yang diperoleh oleh OPD selaku sentra pelayanan masyarakat serta meningkatkan performa, keamanan, kemudahan dalam melakukan pengaturan IP address, kontrol lalu lintas data dan management jaringan backbone intranet dan intranet secara keseluruhan.
- e) Tersedianya Bandwidht Internet se Kota Bogor sebanyak 900 Mbps terealisasi 1250Mbps karena ada penambahan anggaran, Sejalan dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang berbasis Elektronik maka Penggunaan Internet dan Intranet dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bogor, sehingga dibutuhkan pengadaan bandwith yang akan menghubungkan jaringan intranet dan internet di SKPD, Kelurahan dan Instansi lainnya pada Pemerintahan Kota Bogor.

- f) Tersedianya Jaringan Fiber Optik di perangkat daerah sebanyak 4 titik terealisasi 100%. Kegiatan pengadaan perangkat jaringan FO Kota Bogor perlu dilakukan untuk dapat menunjang kegiatan komunikasi dan informasi dalam sarana pengetahuan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta terpenuhi sarana pendukung untuk kelancaran dalam proses pekerjaan khususnya aparatur di OPD dan Kelurahan Pemerintahan Kota Bogor
- g) Terlaksananya perencanaan teknis jaringan FO sebanyak 1 paket terealisasi 100%. Kegiatan perencanaan teknis jaringan FO dimaksudkan untuk merancang atau menyusun pekerjaan perencanaan paket pekerjaan yang akan dikerjakan, sebagai asas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksana tugas perencanaan. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran / output berupa hasil dari perencanaan sesuai dengan yang diharapkan.
- h) Terlaksananya pengawasan teknis jaringan FO sebanyak 1 paket terealisasi 100%. Tujuan kegiatan pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana serta spesifikasi teknis di 4 (empat) titik di wilayah Kota Bogor sehingga kualitas pekerjaan terjamin sesuai rencana dan spesifikasi teknis yang diharapkan.
- i) Terpeliharanya Wifi Ruang Publik sebanyak 5 titik terealisasi 100%. Maksud kegiatan Pemeliharaan wifi publik Kota Bogor adalah agar koneksi jaringan

internet, intranet wifi di ruang publik dapat berjalan baik, lancar, dan stabil.

- j) Tersedianya Wifi Ruang Publik sebanyak 1 titik terealisasi 100%. Kegiatan pembangunan Wifi Publik di wilayah Kota Bogor bertujuan untuk menunjang kebutuhan internet dan Memberikan akses internet secara swadaya/ gratis bagi warga / masyarakat Kota Bogor.
- k) Terpeliharanya Grounding Listrik dan Erester Perangkat Daerah dan Kelurahan sebanyak 7 titik terealisasi sebanyak 100%. Maksud kegiatan Pemeliharaan Grounding adalah untuk menjaga keberlangsungan ketersambungan Internet di SKPD dan Kelurahan Kota Bogor yang sebagian besar masih menggunakan Wireless serta meminimalisir kerusakan perangkat jaringan khususnya perangkat wireless dari gangguan cuaca seperti sambaran petir.

b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada sub kegiatan ini Kegiatan Sosialisasi/Diseminasi telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 3 kali setahun. Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Realisasi capaian kegiatan 100%, dengan kegiatan Sosialisasi/Diseminasi sebagai berikut:

- a) Forum Smart City - Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bogor yang dilaksanakan di hotel Sahira Bogor pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021

- b) Webinar Sosialisasi Aplikasi Tata Naskah (TND) Kota Bogor yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 22 September 2021
- c) Sosialisasi & Pelatihan Aplikasi “Bogor Berlari” Untuk Para UMKM di Kota Bogor yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna DPRD Kota Bogor pada hari Selasa 16 November 2021

2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini memiliki 3 target output dengan realisasi 100 % sebagai berikut :

- a) Terkelolanya Perangkat Pusat Data sebanyak 1 paket, digunakan untuk pengadaan perangkat yang digunakan di Pusat Data Kota Bogor yaitu perangkat monitoring server data center (KVM).
- b) Tersedianya Router sebanyak 1 paket,
- c) Tersedianya Data Recovery Center sebanyak 1 paket, digunakan untuk perpanjangan sewa Data Recovery Center (DRC) yang akan digunakan sebagai Pusat Data cadangan data dan aplikasi yang disimpan di Pusat Data Kota Bogor.

3) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini memiliki target output terkelolanya Perangkat Teleconference Kota Bogor sebanyak 1 paket, terealisasi 100% untuk perpanjangan lisensi akun aplikasi Zoom milik Pemerintah Kota Bogor, yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan teleconference yang diadakan pimpinan daerah dan instansi Kota Bogor. Selain untuk perpanjangan lisensi, anggaran juga digunakan untuk pengadaan perangkat pendukung

conference yaitu camera conference dan perangkat audio.

4) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki target output terpeliharanya Jumlah Titik CCTV di Lingkup Kota Bogor sebanyak 69 titik dengan realisasi 100%.

5) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sub kegiatan dimaksud direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yakni kebutuhan pembangunan/ pengembangan aplikasi serta perangkat keras maupun lunak.

Sub kegiatan ini memiliki 10 target output. 9 target output terlaksana 100%, sedangkan 1 target output tidak terlaksana.

Adapun target yang terlaksana adalah :

- a) Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/dipelihara oleh Diskominfo sebanyak 3 aplikasi
- b) Tersedianya Aplikasi Dashboard khusus covid sebanyak 1 aplikasi
- c) Tersedianya Colocation Server Webmail Kota Bogor selama 1 tahun
- d) Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel selama 1 tahun
- e) Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor selama 1 tahun
- f) Tersedianya Memory Server sebanyak 5 unit

- g) Tersedianya Harddisk Server sebanyak 2 unit
- h) Tersedianya Perangkat Pendukung Pengembangan Aplikasi sebanyak 1 unit
- i) Tersedianya Workshop Integrasi sebanyak 1 pertemuan.

Sedangkan target yang tidak terlaksana adalah tersedianya Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah - Kota Bogor sebanyak 1 paket, dikarenakan tanggal pengesahan APBD-P di akhir November sehingga tidak memenuhi prasyarat kewajaran pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud.

6) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sub kegiatan ini memiliki target output terpeliharanya Server Datawarehouse sebanyak 1 paket dengan realisasi 100%.

Sub Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara server datawarehouse dengan melakukan upgrade pada kemampuan server di sisi kapasitas (Harddisk Server) dan RAM Server. Paket telah terlaksana dengan baik dan hardware yang dimaksud sudah tersedia.

7) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Sub kegiatan ini memiliki target output tersedianya Sarana Komunikasi Digital sebanyak 1 paket dengan realisasi 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Tersedianya Sarana Komunikasi Digital melalui 1 paket pengadaan
- b) Tercapainya peningkatan nilai evaluasi smart city Kota Bogor dari 3,12 pada tahun 2020, meningkat

menjadi 3,33 pada tahun 2021

- c) Tercapainya peningkatan indeks RKCI Kota Bogor sebesar 166% dari capaian tahun 2019/2020 dengan diperolehnya 10 kategori kesiapan kota cerdas dan kesiapan transformasi digital.

8) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Sub kegiatan ini memiliki 2 target output dengan realisasi 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Terpeliharanya perangkat multimedia bogor green room/ command center sebanyak 1 paket
- b) Tersedianya peralatan personal computer sebanyak 1 paket

Dengan meningkatnya kualitas layanan Multimedia Bogor Green Room (BGR)/ command center, tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan pandemi Covid19, menunjang penyelenggaraan rapat dan koordinasi pimpinan masih banyak dilaksanakan dilaksanakan secara *daring* maupun *hybrid*. Kegiatan tersebut dapat difasilitasi dengan baik menggunakan fasilitas layanan Multimedia *Bogor Green Room* (BGR)/ *command center*

9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Sub kegiatan ini memiliki target output tercapainya hasil penilaian SPBE 2,92 indeks.

Capaian untuk subkegiatan dimaksud sebesar 104,71% dengan perolehan indeks SPBE tahun 2021 sebesar 3,11 naik sebesar 0,14 dari nilai indeks SPBE tahun 2019/2020 yang sebesar 2,97. Secara umum berada

pada posisi yang lebih tinggi dari rata-rata nilai indeks SPBE Nasional yang sebesar 2,24. Capaian indeks SPBE Kota Bogor berada 0,87 point di atas nilai rata2 nasional.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral

Sub kegiatan ini memiliki target output Terselenggaranya satu data statistik sektoral sebanyak 2 paket dengan realisasi 100%.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah untuk memfasilitasi pengelolaan data sektoral melalui pemanfaatan perangkat lunak atau pun keras dalam bentuk Paket Pembelian server satu data dan Paket pengembangan/pemeliharaan Portal Data.

2) Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Sub kegiatan ini memiliki target output tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan sebanyak 1 Media dengan realisasi 100%.

Hasil publikasi statistik sektoral dalam bentuk satu media, yaitu melalui media Buku. Selama tahun 2021 Bidang Statistik Sektoral telah mencetak dan mendistribusikan 3 buku yaitu:

- a) Buku Laporan Akhir Survei Indeks Ketahanan Keluarga

- b) Buku Metadata Statistik Sektoral tahun 2021
- c) Buku Bogor Dalam Angka 2021

3) Membangun Metadata Statistik Sektoral

Sub kegiatan ini memiliki 2 target output yaitu Tersusunnya metadata statistik sektoral sebanyak 1 paket dan Tersusunnya Buku Induk Statistik sebanyak 1 paket.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud mencapai 100% sesuai dengan targetnya yaitu tersusunnya metadata statistik sektoral sebanyak 20 metadata dari 4 Instansi Produsen Data, dan tersusunnya Buku Induk Statistik Sektoral yang berisikan data sektoral dari 25 Produsen Data.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki 5 target output dengan realisasi 100%, yaitu :

- a) Tersedianya Antivirus sebanyak 12 lisensi. Antivirus adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan untuk menangkal virus, memberikan perlindungan serta keamanan data dan sistem di komputer. Antivirus ini digunakan pada beberapa Server yang ada pada Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

- b) Tersedianya Software (Microsoft Office) sebanyak 5 lisensi. Pada saat ini dalam pekerjaan sehari – hari tidak lepas dari penggunaan komputer, pekerjaan yang menjadi rutinitas adalah mengelola dokumen. Untuk memudahkan pekerjaan dalam mengelola dokumen, digunakan software dengan nama Microsoft Office. Sudah menjadi keharusan software yang digunakan adalah software dengan lisensi original dan legal. Selain itu dengan menggunakan software berlisensi original dan legal bisa mencegah adanya serangan virus atau malware.
- c) Tersedianya Sistem Operasi (Windows) sebanyak 10 lisensi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya (resources) dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user (brainware). Sistem Operasi yang umum digunakan adalah Sistem Operasi Windows.
- d) Tersedianya SSL sebanyak 1 lisensi. Tujuan pekerjaan Perpanjangan Lisensi SSL (Secure Socket Layer) Pemerintah Kota Bogor ini adalah sebagai upaya untuk tetap menjaga dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan website pemerintahan di Kota Bogor. Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pengadaan adalah : Lisensi SSL (Secure Socket Layer) yang siap pakai dengan target waktu sesuai dengan komitmen waktu pelaksanaan; dan SSL (Secure Socket Layer) berjalan sesuai kebutuhan.
- e) Tersedianya Firewall sebanyak 1 lisensi. Firewall adalah sistem keamanan untuk mengelola dan

memantau trafik masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan (security rules) yang sudah ditentukan. Firewall berfungsi mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam jaringan atau server. Dengan banyaknya server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Firewall menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan.

2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini mengalami refocusing anggaran secara keseluruhan, namun terdapat output yang dikeluarkan tanpa menggunakan anggaran sebagai berikut :

a) Penerbitan Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas diri dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai upaya untuk peningkatan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik, serta upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari hari.

Dalam Penerbitan Sertifikat Elektronik telah berhasil diterbitkan Sertifikat Elektronik sebanyak 277 Sertifikat di Seluruh Perangkat Daerah Kota Bogor.

b) Penetration Testing Aplikasi

Kegiatan Penetration Testing (Pentest) adalah pengujian keamanan informasi pada sebuah sistem

informasi atau aplikasi.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penialaian kerentanan keamanan informasi dari sebuah sistem informasi atau aplikasi sebelum aplikasi atau sistem tersebut di operasionalkan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tidak menerima tugas Pembantuan.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tidak memberikan tugas Pembantuan.

BAB V

PENYELENGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2021.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama Antar Daerah yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2021 yaitu :

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor Nomor: 2409/HK.03/DISKOMINFO, Nomor : 119/Perj.46-Diskominfo/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam rangka penerapan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang Nomor: 119/PKS.120-Diskominfo/2020, Nomor: 415.4/02/PKS/Kominfo/2020 tentang Pengembangan dan Implementasi Smart City Kota Bogor di Kota Palembang
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor Nomor: 130/1398-Diskominfo, Nomor: 119/Perj.91-Diskominfo/standi/2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Smart City Kota Bandung di Kota Bogor

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2021 yaitu:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT. Cartendz Techno Lab Nomor : 119/KK.5-DISKOMINFO/2020, Nomor : 024/MOU.JEJAK/PEMKOT BOGOR-CTL/VI/2020 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Aplikasi Jejak
2. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan di Pemerintah Kota Bogor dengan ruang lingkup kerjasama yaitu:
 - a. Pengkajian dan kebijakan teknologi yang meliputi penguatan sistem inovasi daerah, pengembangan kluster industri unggulan daerah, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur, dan pengembangan pilar tematik;
 - b. Pengkajian dan penerapan teknologi agro industri dan bioteknologi;
 - c. Pengkajian dan penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan;
 - d. Pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;
 - e. Pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi dan material. Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 24 Mei 2017. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Implementasi SIMRAL terintegrasi berikut pendampingan, pengembangan dan pengintegrasian. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi di

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan menyusun prioritas integrasi secara terukur dan mengsinkronkan dengan program KPK.

3. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Indonesia Cable Network tentang Pemanfaatan Saluran Khusus Televisi (TV) Kabel Dan Jaringan HYBRID FIBER COAXIAL dengan ruang lingkup kerjasama yaitu:
 - a. Pemanfaatan 1 (satu) saluran khusus TV Kabel Megavision;
 - b. Pemasangan closure pada jaringan HFC sebesar 2 (dua) Core atau setara dengan 2 (dua) Gigabyte sebagai Clear Channel;
 - c. Pemeliharaan 8 (delapan) jaringan HFC sebesar 2 (dua) Core atau setara dengan 2 (dua) Gigabyte sebagai Clear Channel;
 - d. Pemanfaatan beberapa fasilitas dan beberapa ruas jalan di Kota Bogor untuk penanaman tiang dan penarikan jaringan kabel.

Jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 September 2017. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemanfaatan salah satu saluran TV Megavision untuk Sipatahunan TV dan Pemanfaatan 2 core Kabel Fiber optik milik PT. ICN untuk Pemerintah Kota Bogor. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat kendala yang dihadapi yaitu proses perijinan perluasan jaringan ada di Perangkat Daerah lain (DPMPSTP dan Dinas PUPR). Sehingga disarankan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mengeluarkan ijin.

4. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan ruang lingkup kerjasama yaitu:
 - a. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan

- pemerintah;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - c. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam sistem elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Bogor;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Jangka waktu perjanjian selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengajuan penertiban Sertifikat Elektronik dan Asistensi Sistem Informasi pada Bapenda dan BKPSDA.

C. PRESTASI DAN PENGHARHAAN

Pada Tahun 2021, Pada urusan komunikasi dan informatika Kota Bogor memperoleh penghargaan yaitu :

1. Penghargaan Smart City

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, melaksanakan Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City).

Pada Tahun 2021 Kota Bogor meraih **Penghargaan Implementasi Kota Cerdas Kategori Smart Environment** dalam Program Bogor Tanpa Kantong Plastik (BOTAK).

2. Penghargaan Rating Transformasi Digital (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI)

Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia melakukan penelitian terkait evaluasi kota cerdas, salah satunya dengan menyelenggarakan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) sebagai bagian dari evaluasi implementasi kota cerdas Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan 2 tahunan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi

terhadap implementasi konsep kota cerdas di Indonesia. Hasil dari RKCI adalah indeks kota cerdas untuk kota besar, kota sedang dan kota kecil beserta beberapa kategori khusus yang ada di Indonesia. Hasil ini merepresentasikan kota yang paling tinggi dalam mendapatkan benefit dari implementasi kota cerdas. Penghargaan RKCI dan RTDI diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) ITB Bandung.

Tahun 2021 Kota Bogor meraih **10 Penghargaan dari 10 Kategori**, yaitu :

- a. Kategori Kota Menuju Cerdas Tingkat Kota Besar
 - b. Kategori Kota dengan Kesiapan Digital Terbaik Tingkat Kota Besar
 - c. Kategori Kota dengan Kesehatan Cerdas Tingkat Kota Besar
 - d. Kategori Kota dengan Ekonomi Cerdas Tingkat Kota Besar
 - e. Kategori Kota Tangguh (Resilience City) Tingkat Kota Besar
 - f. Kategori Kota dengan Masyarakat Cerdas Tingkat Kota Besar
 - g. Kategori Kota dengan Lingkungan Cerdas Tingkat Kota Besar
 - h. Kategori Kota dengan Mobilitas Cerdas Tingkat Kota Besar
 - i. Kategori Kota dengan Energi Cerdas Tingkat Kota Besar
 - j. Kategori Kota dengan Perhatian Terhadap Perubahan Iklim Tingkat Kota Besar
3. Penghargaan terbaik ke 1 Pengelolaan Media sosial tingkat kota/kabupaten se Jawa Barat.

Penghargaan ini diarahkan dalam ajang Humas Jabar Award 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 2021.

Penyematan penghargaan ini merupakan apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para insan literasi yang telah berjuang memberikan kontribusi dalam pelayanan informasi dan literasi digital kepada masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor (RPJMD) Tahun 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun Anggaran 2021, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta layanan pengaduan dan aspirasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai langkah awal menuju Bogor sebagai *Smart City*.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2021 berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan belum maksimal dalam realisasi penyerapan anggarannya karena kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja.